

**PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI  
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**SINTIA MAYA SARI  
NIM. 180802004**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sintia Maya Sari  
Nim : 180802004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 10 September 2000  
Alamat : Desa Kute Kering, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan lain dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang menyatakan,

  
  
Sintia Maya Sari  
NIM.180802004

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT PETANI KOPI DI KABUPATEN BENER MERIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**SINTIA MAYA SARI**  
NIM.180802004

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Banda Aceh, 2024

Disetujui untuk Di Munaqasyahkan Oleh :  
**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I



**Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.**  
NIP. 196610231994021001

Pembimbing II



**Cut Zamharira, S.IP., M.AP.**  
NIDN. 2017117904

**PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI DI  
KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

**SINTIA MAYA SARI**


NIM. 180802004

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Februari 2024 M  
18 Sya'ban 1445 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
Prof. Dr. Muslim Zamuddin  
NIP. 196610231994021001

Sekretaris,

  
Cut Zamharira, S.I.P., M.AP.  
NIDN.2017117904

Penguji I,

  
Dr. Mahmuddin, M.Si.  
NIP. 1972102019997031002

Penguji II,

  
Zakki Fuad Khalil, S.I.P., M.Si.  
NIP. 199011192022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



## ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Berdasarkan data kementerian pertanian 2018, kemudian Aceh merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia salah satu Kabupaten di Aceh dengan penghasil kopi adalah Bener Meriah. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Bener Meriah adalah bertani kopi. Namun belum ada upaya yang serius dari pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam memberdayakan para petani kopi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui apa saja peran Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Bener Meriah serta apa saja kendala dan tantangan bagi Dinas Pertanian Dan Pangan dalam pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Bener Meriah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan petani kopi di Bener Meriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah memiliki peran yang penting dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi baik secara internal maupun eksternal. Adapun peran internal yang dimaksud adalah Dinas Pertanian dan Pangan berperan sebagai fasilitator. Sedangkan Peran eksternal mencakup kerja sama dengan pihak luar seperti dengan LSM, Lembaga Pendidikan atau Organisasi Masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan petani kopi ditemukan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Rendahnya anggaran daerah, serta Kurangnya kesadaran petani. Namun walaupun begitu Dinas Pertanian terus berusaha untuk melakukan yang terbaik demi menciptakan kesejahteraan bagi petani kopi.

**Kata Kunci:** *Peran, Dinds Pertanian Dan Pangan Dalam, Pemberdayaan*



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Swt. karena berkat karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Kabupaten Bener Meriah” dengan lancar. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah menjadi penerang bagi peradaban dunia.

Rasa terima kasih ingin penulis sampaikan kepada orang tua yang telah mendoakan dan mendukung penulis yang luar biasa serta memberikan segala kebutuhan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya terimakasih juga kepada abang dan adik saya serta seluruh keluarga dan kerabat yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan.

Selama melakukan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, arahan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

3. Siti Nur Zalikha, M,Si. Selaku dosen penasehat akademik yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan hingga akhir penulisan proposal.
4. Dr. Mahmuddin, M,Si\_ Selaku dosen pengajar mata kuliah Seminar Administrasi Negara, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
5. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. dan ibu Cut Zamharira, S.IP., M.AP selaku dosen pembimbing satu dan pembimbing 2 yang sudah berkenan membimbing peneliti dari awal penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar menjadi pembelajaran dan juga menjadi penyempurna skripsi kedepannya dan bisa berguna serta bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Banda Aceh,  
Peneliti

Sintia Maya Sari  
NIM.180802004

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
1.6 Penjelasan Istilah .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Teori peran .....	8
2.1.2. Peranan Pemerintah.....	11
2.1.3. Teori Pemberdayaan.....	14
2.1.4. Pemberdayaan Masyarakat Petani.....	17
2.3. Penelitian Terdahulu .....	18
2.4. Kerangka Pemikiran .....	23
2.5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Petani.....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	26



3.2. Fokus Penelitian.....	26
3.3. Lokasi penelitian.....	27
3.4. Jenis Dan Sumber Data.....	27
3.5. Informan Penelitian.....	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7. Teknik Pengolahan Data.....	30
3.8. Teknik Keabsahan Data.....	32
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
4.1. Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1. Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.....	34
4.1.2. Struktur Organisasi.....	35
4.1.3. Visi dan Misi.....	36
4.2. Hasil Penelitian.....	38
4.2.1. Pendidikan dan Pelatihan.....	38
4.2.2. Penyuluhan dan Pendampingan.....	42
4.2.3. Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian.....	46
4.2.4. Fasilitas Pemberdayaan dan Permodalan.....	49
4.3. Pembahasan.....	51
4.3.1. Peran Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Bener Meriah. ....	51
4.3.2. Kendala Dan Tantangan Bagi Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Pemberdayaan Petani Kopi di Kabupaten Bener Meriah. ....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>

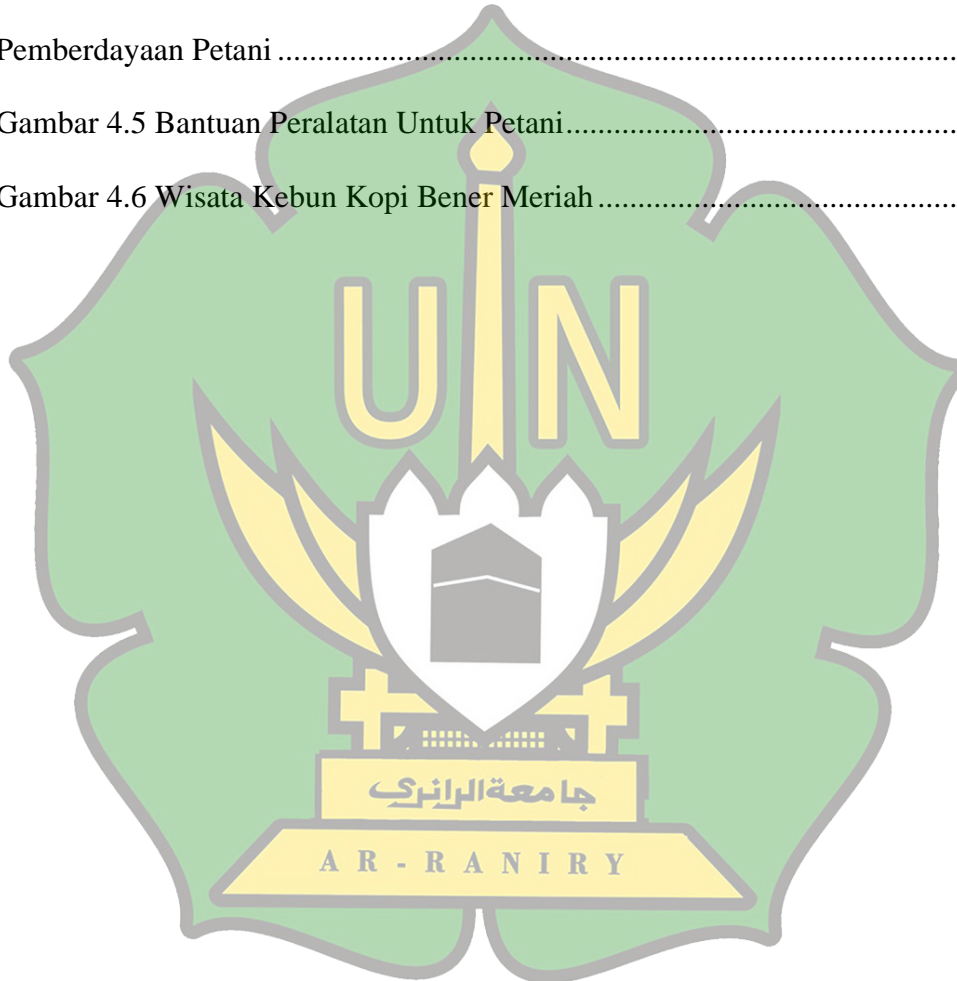
## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	27
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	28



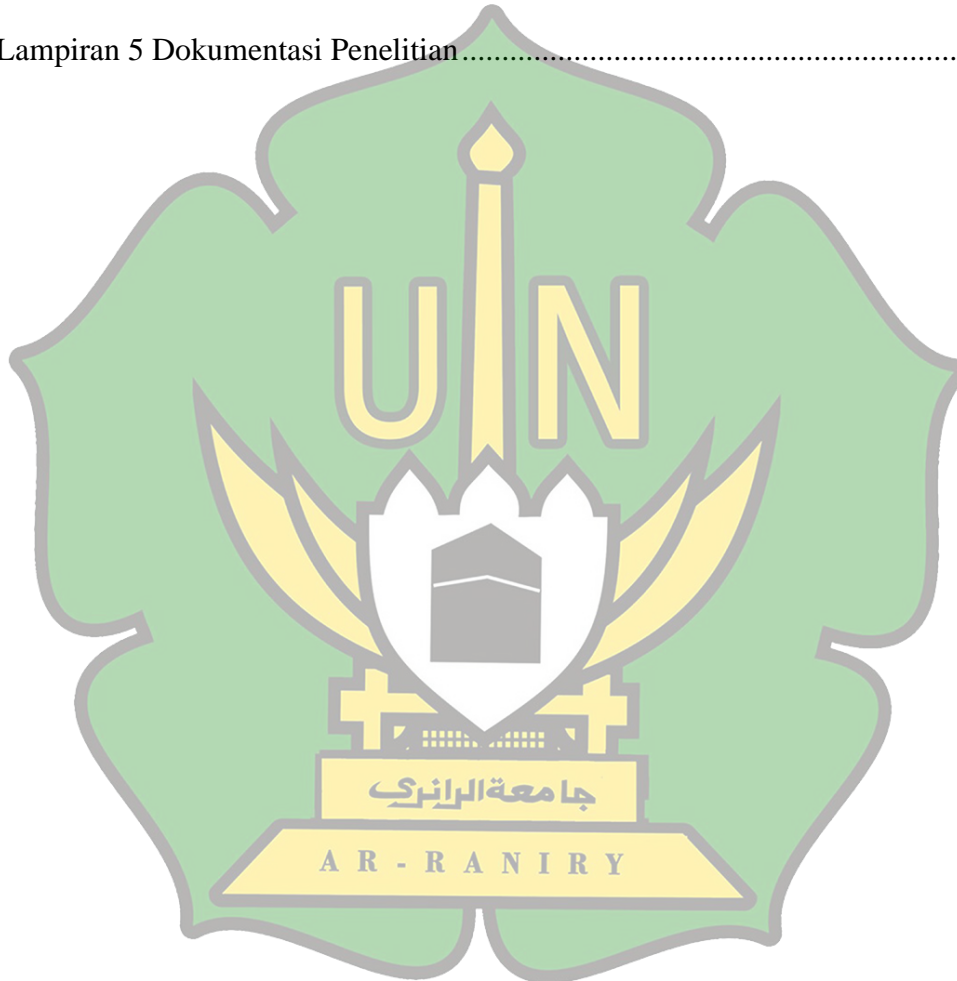
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah .....	35
Gambar 4.2 Pelatihan Pembuatan Pupuk Dari Kulit Kopi.....	40
Gambar 4.3 Penyuluhan Untuk Petani Kopi .....	43
Gambar 4.4 Kolaborasi Antara Pertamina dengan Dinas Pertanian Dalam Membantu Pemberdayaan Petani .....	44
Gambar 4.5 Bantuan Peralatan Untuk Petani.....	47
Gambar 4.6 Wisata Kebun Kopi Bener Meriah.....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Prosedur Pertanyaan Wawancara .....	65
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi .....	68
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	69
Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian .....	70
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	71



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Komoditas kopi dibudidayakan di 50 negara karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi diantara tanaman komoditas perkebunan lainnya, serta berkontribusi pada masuknya devisa Negara. Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Berdasarkan data kementerian pertanian 2018, produksi kopi Indonesia berada di daerah dataran rendah dan dataran tinggi dengan jumlah total luas lahan yang dimiliki Indonesia, terdapat indikasi bahwa tingkat produktivitas masih rendah, yaitu 731 kg per hektare. Berdasarkan potensinya, kopi saat ini tengah menjadi gaya hidup dikalangan generasi muda ditandai dengan menjamurnya warung-warung kopi dengan tampilan kekinian, bersamaan dengan itu, kualitas kopi juga harus diperhatikan oleh petani kopi, petani kopi di Indonesia masih belum memahami produk kopi dengan standar yang baik dan sesuai permintaan pasar. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat diperlukan untuk mentransfer pengetahuan pengelolaan serta pengembangan produksi kopi kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia salah satu Kabupaten di Aceh dengan penghasil kopi adalah Bener Meriah. Bener Meriah memiliki iklim yang baik untuk membudidayakan perkebunan kopi, tanaman kopi sudah lama dibudidayakan oleh masyarakat Aceh dataran tinggi Gayo. Pertumbuhan

---

<sup>1</sup>Arifin Sihombing, RenaldiHolomoan, Simto FR Tampubolon. *Peranan Pemerintah Kabupaten Toba Dalam pemberdayaan Masyarakat petani Kopi di Desa Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba*, Vol 6 N0 2, Oktober 2021



penanaman kopi di Bener Meriah terus meningkat setiap tahunnya, bahkan kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan dengan skala produksi yang besar di kabupaten Bener Meriah. Menurut dinas kehutanan dan perkebunan setempat, jumlah luas areal perkebunan kopi mencapai 50.233,96 hektar dengan luas pengembangan mencapai 45.316,04 hektar.

Kopi memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, melihat kabupaten Bener Meriah membudidayakan kopi di setiap kecamatan. Bahkan diketahui bahwa kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah merupakan daerah yang mendapat sertifikat tingkat Nasional yaitu kopi arabika Gayo 1 dan kopi Arabika Gayo 2 menjadi varieties unggulan tingkat nasional yang disahkan dengan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 3998 dan 3999/ Kpts/ SR.120/12/2010 tanggal 29 Desember 2010.<sup>2</sup>

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Bener Meriah adalah bertani kopi, pada pertanian sub-sektor perkebunan di Bener Meriah tanaman kopi merupakan penghasil terbesar di dibandingkan dengan sub-sektor perkebunan yang lain dan menyerap tenaga kerja yang paling banyak dengan terbukti dengan produksi di kabupaten yang terus meningkat dari 2016 produksi 21.404 ton, 2017 produksi 27.294 ton dan 2018 produksi 29.357 ton.<sup>3</sup>

Pemberdayaan diatur dalam Undang-Undang nomer 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Petani, bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah, baru sebatas pembagian bibit kopi kesetiap KK. Pemberdayaan

---

<sup>2</sup> Ali Munawar Djafri Khalil, Manager Nasution, Arief Safari, Riawan Amin, Aries Muftie, *Model Pembiayaan Syariah Untuk Perkembangan Perkebunan Kopi Di Kabupaten Bener Meriah*, Vol 7 No.1, Januari-Juni 2018.

<sup>3</sup> Masri ramadhan, Syarifuddin, *Analisis Pendapatan Usaha Tani Kopi Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah*, Vol 3, no.1, 1 Mei 2021.

penting dilakukan bagi petani kopi, sehingga memiliki keterampilan yang memadai dalam pengembangan komoditas kopi. Selain itu, bantuan teknologi, bibit, pupuk, juga tidak kalah penting. Peran penting Dinas pertanian dan pangan kabupaten Bener Meriah yang mendukung penguatan petani kopi sebagai potensi daerah, akan memberikan ruang usaha yang ramah bagi para petani, dan juga menjadi komoditas unggulan daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai dengan kewenangan. Strategi perlindungan petani dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komunitas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim dan asuransi petani. Adapun strategi untuk pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.<sup>4</sup> Namun belum ada upaya yang serius dari pemerintah kabupaten bener meriah dalam memberdayakan para petani kopi, hal ini di buktikan dengan masih adanya petani yang tidak dapat membeli pupuk kimia untuk memberikan nutrisi bagi tanaman kopi yang mengakibatkan kopi tidak berkembang dengan baik serta membuat

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

pemeliharaan dan produksi kopi kurang efektif, masih rendahnya fasilitas pengolahan yang mempengaruhi daya saing kopi ekspor.<sup>5</sup>

Dalam observasi awal yang peneliti lakukan, permasalahan dalam pengembangannya, kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan permodalan juga kurangnya kelembagaan kelompok tani dan eksploitasi sumber daya yang tidak merata. Rata-rata perkebunan kopi di Bener Meriah adalah perkebunan masyarakat dan pengolahannya juga terbilang masih sederhana karena masih menggunakan peralatan pertanian yang minim, hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya hasil, biji kopi berkualitas rendah, terlambat panen dan gagal panen. Selain masalah teknis tersebut, kendalanya yang menjadi masalah para petani kopi adalah kurangnya dana (Biaya produksi), pengaruh cuaca dan hama.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Di Kabupaten Bener Meriah”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, maka peneliti akan memberikan identifikasi masalah yang akan di jadikan bahan untuk penelitian “ kurangnya pemberdayaan petani di kabupaten Bener Meriah, tidak adanya control langsung dari dinas pertanian terhadap petani yang sudah di beri bibit, tidak adanya pelatihan terhadap petani untuk memiliki keterampilan untuk mengembangkan komoditas

---

<sup>5</sup> Dandi ramadhan, *Pemberdayaan Petani Kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh*, NPP.29.0017

<sup>6</sup> Ibid,

kopi, kurangnya pengetahuan petani terhadap adanya pasal yang mengatur tentang pemberdayaan dan kesejahteraan petani”.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti merumuskan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa saja peran Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Bener Meriah?
2. Apa saja kendala dan tantangan bagi Dinas Pertanian Dan Pangan dalam pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Bener Meriah?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja peran Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan tantangan bagi Dinas Pertanian Dan Pangan dalam pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Bener Meriah.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah Bener Meriah dalam mengembangkan sektor pertanian dan sumber daya alam melalui pemberdayaan petani kopi
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan petani Bener Meriah
3. Menambah wawasan penulis dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

4. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan berdampak positif khususnya bagi masyarakat Bener Meriah.

## 1.6 Penjelasan Istilah

Dalam rangka memudahkan para pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini, peneliti membuat penjelasan dari beberapa istilah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran. Peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Peran bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.
2. Dinas Pertanian dan Pangan. Dinas pertanian dan pangan adalah suatu instansi pelaksana pemerintah daerah dibidang pertanian dan ketahanan pangan.
3. Pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan upaya dalam membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.
4. Masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan.



5. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori peran

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Barbara, menyatakan bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran di pengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa, peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.<sup>7</sup>

Menurut Jack C. Plano, yang dimaksud dengan peran dalam kamus analisa politik diartikan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang yang menduduki posisi tertentu. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah sebagai akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang dipegang oleh seorang aktor politik. Aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, mulai dari aktor negara, presiden, menteri luar negeri, bahkan warga biasa sekalipun yang masing-masing posisi itu memiliki pola perilaku

---

<sup>7</sup> Wiwing Anggrianingsih, Andi Rosdianti Razak, Anwar Parawangi, *Peran Dinas Pertanian Dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat*, Vol, 2 No. 3, Juni 2021.

masing-masing.<sup>8</sup> Sedangkan peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.<sup>9</sup>

Menurut Bruce J. Cohen peran memiliki beberapa bagian yaitu:<sup>10</sup>

- a. Peran nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peran tertentu.
- c. Konflik peranan (*Conflict Role*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peran (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

---

<sup>8</sup> Aisyah Rahmaini Fahma, Tesis: “*Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran*”, (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2018), Hal. 15

<sup>9</sup> Syaron Dkk, “*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 04, No. 048, (2017), Hal. 2

<sup>10</sup> Afriadi, Tesis: “*Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), Hal. 26

- f. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Ketegangan peran (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sutarto bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen yaitu:<sup>11</sup>

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancaran nya.

Dengan demikian, teori identitas peran berusaha untuk mengintegrasikan struktural-fungsionalis dan perspektif interaksionis simbolik. Fungsionalisme struktural berfokus pada bagaimana struktur sosial melembagakan harapan perilaku yang stabil di berbagai situasi dan; tergantung pada fungsi, hierarki, dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal. 26

status; bagaimana posisi itu mempengaruhi konsep-diri. Sejalan dengan itu, interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana individu saling berhubungan di seluruh jaringan peran-hubungan yang menciptakan makna bagi penghuni peran dan menyediakan tempat kerja atau skema kognitif untuk menafsirkan pengalaman peran ekstra. Dengan demikian, teori identitas peran telah berkembang dari sekedar menjelaskan harapan bersama, dilembagakan dan normatif yang diberikan posisi dalam beberapa struktural sosial seperti organisasi atau komunitas praktik hingga mengeksplorasi proses-proses yang digunakan oleh penghuni peran menentukan diri mereka sendiri dan peran mereka terhadap interaksi sosial dengan penghuni peran lainnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan oleh seseorang yang menduduki sebuah posisi baik dalam maupun luar organisasi untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

### 2.1.2. Peranan Pemerintah

Sebuah negara didirikan dengan satu tujuan yang sama, yakni untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam hal ini termasuk kemakmuran, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Oleh karena itu, negara membentuk suatu organisasi yang bernama pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan negara untuk merencanakan, menetapkan tujuan dan sasaran.

---

<sup>12</sup> Afta Falasifah, Tesis: “*Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, Work-Family Conflict Dan Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen Organisasi Pada Karyawan Wanita Di CV. Mubarakfood Cipta Delicia*”, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019), Hal. 18



Menurut Bagir Banan mengungkapkan; pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintah sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Maksud dari fungsi ini adalah agar negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.<sup>13</sup>

Menurut Iyas Yusuf fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:<sup>14</sup>

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah

---

<sup>13</sup> Meri Enita Puspita Sari, "Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik", *Jurnal Trias Politika*, Vol. 2, No. 1, (2018), Hal. 2

<sup>14</sup> Irfan La Abu, Skripsi: "*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemasaran Pariwisata Bahari Di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah*", (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), Hal. 13

berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

### 3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendamping melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Awaloedin dalam Tjokroamidjojo mengklasifikasikan berbagai peran pemerintah ke dalam tiga kelompok yaitu:<sup>15</sup>

1. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat berupa penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perizinan, serta pengawasan.
2. Pemilik sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau swasta.
3. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi atau sosial.

Menurut Dumairy peran pemerintah daerah dapat terbagi menjadi empat:

---

<sup>15</sup> Rizky A. Prasajo dan Lulu Fauziah, “Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”, JKMP, Vol. 3, No. 1, (2015), Hal 53

- a. Peran Alokatif, yaitu peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan efisiensi produksi.
- b. Peran Distributif, yaitu peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil ekonomi adil dan wajar.
- c. Peran Stabilisasi, yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya.
- d. Peran Dinamisatif, yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.<sup>16</sup>

### 2.1.3. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memiliki arti kekuatan. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merrian Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengandung dua pengertian:

- a. *To give ability or enable to* (kecakapan/kemampuan atau kemungkinan)
- b. *To give power of authority to* (memberi kekuatan)

---

<sup>16</sup> Wiwing Anggrianiingsih, Andi Rosdianti razak, Anwar Parawangi, *Peran Dinas Pertanian Dalam program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat*, Vol, 2 No.3, Juni 2021.

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan mengacu pada kapasitas setiap orang dalam memfokuskan masyarakat yang rentan dan lemah sehingga masyarakat mendapatkan hak istimewa dimana tidak hanya bebas menyampaikan pendapat tetapi bebas juga dari kelaparan dan kesakitan. Memberdayakan mencapai sumber daya produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan serta memperoleh barang yang mereka butuhkan dan berkontribusi pada konteks pembangunan keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, Edi Suharto juga menyimpulkan bahwa terdapat indikator-indikator keberdayaan masyarakat yang meliputi:<sup>18</sup>

1. Kekuasaan Dalam (*Power Within*)

Adanya kesadaran dan keinginan untuk berubah, yaitu meliputi keinginan untuk berperan dalam mengembangkan kearifan, keinginan untuk berpartisipasi dan mengembangkan potensi diri dalam pengembangan kearifan lokal.

2. Kekuasaan Untuk (*Power to*)

Kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses meliputi bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, kemudahan dalam memperoleh kredit dan kemudahan berkerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal dan perusahaan.

3. Kekuasaan Atas (*Power Over*)

---

<sup>17</sup> Sri Wahyuni, Skripsi: *Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan kearifan lokal tikar mendong (studi pada pengrajin tikar mendong kelurahan singkup kecamatan purbaratu kota tasikmalaya)*, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2022), Hal. 10

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hal. 13

Kemampuan menghadapi hambatan meliputi terpenuhinya kebutuhan hidup, perubahan dan kepemilikan aset, adanya perubahan peran di dalam keluarga, serta peran dan keterlibatan di dalam masyarakat.

#### 4. Kekuasaan Dengan (*Power With*)

Kemampuan kerja sama dan solidaritas meliputi adanya kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengembangan kearifan lokal kopi Gayo, adanya solidaritas terhadap sesama anggota kelompok, mampu mengatasi hambatan dalam pengelolaan kearifan lokal kopi Gayo.

Konsep pemberdayaan yang telah dipaparkan diatas mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*Community Development*) dan pembangunan berbasis masyarakat (*Community Based Development*) dan pada tahap selanjutnya yaitu muncul istilah *Driven Development* yang artinya pembangunan yang diarahkan oleh masyarakat atau *Community Directed Development* atau pembangunan berbasis masyarakat.

Pemberdayaan juga diartikan sebagai sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupan yang menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:



- a. Upaya harus terarah. Upaya ini ditujukan langsung kepada masyarakat yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Program harus ditujukan langsung kepada masyarakat.
- c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena pendekatan sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.<sup>19</sup>

Secara keseluruhan pemberdayaan adalah proses untuk membantu masyarakat dan individual yang tidak diuntungkan untuk bersain dengan baik dan keperluan lainnya, serta menolong masyarakat untuk belajar serta memanfaatkan saat bernegosiasi, memahami bagaimana sistem kerja, menggunakan media dengan baik dan benar, terlibat dalam tindakan polis dan lain sebagainya.

#### 2.1.4. Pemberdayaan Masyarakat Petani

Pemberdayaan atau juga disebut empowerment adalah “*is passing on authority and responsibility*” (lebih berdaya dari sebelumnya dalam arti wewenang dan tanggung jawabnya termasuk kemampuan individual yang dimilikinya). Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya dengan potensi yang sudah ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hamid juga mengatakan bahwa pemberdayaan yakni meningkatkan kualitas kehidupan untuk berdaya, mewujudkan kemandirian masyarakat agar tercapainya kehidupan yang sejahtera.

<sup>19</sup> [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA\\_KAMIL/Pengertian\\_Pemberdayaan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA_KAMIL/Pengertian_Pemberdayaan.pdf), di akses tanggal 18 september 2022

Pemberdayaan dapat dibagi menjadi dua sebagai proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Pemberdayaan sebagai proses merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakat dalam arti luas).

Sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>20</sup>

Masyarakat petani adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Tahap awal yang perlu ditempuh untuk memberdayakan petani adalah membentuk kelembagaan berupa kelompok tani yang merupakan organisasi kerjasama khusus yang dibentuk di lingkungan masyarakat

## 2.2. Penelitian Terdahulu

---

<sup>20</sup> Arifin Sihombing, Renaldi Holomoan Silalahi, Simto FR Tampubolon, *Peranan Pemerintah Kabupaten Toba Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Di Desa Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Universitas Darma Agung Medan, Vol, 6 No.2, Oktober 2021.*

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti sudah pasti membutuhkan acuan yang berkaitan dengan penelitian ini yang bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari melampirkan penelitian terdahulu didalam penelitian ini adalah untuk menghindari anggapan kesamaan atau penjiplakan dari peneliti sebelumnya. Adapaun dalam penelitian ini peneliti melampirkan tiga penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan. Adapun tiga penelitian terdahulu beserta perbedaan dan persamaannya adalah sebagai berikut:

**2.2.1. Arifin Sihombing, Renaldi Holomoan Silalahi, Simto FR Tampubolon “Peranan Pemerintah Kabupaten Toba dalam Pemberdayaan Masyarakat petani Kopi di desa Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba”.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian dan Perikanan dalam upaya pemberdayaan petani kopi di Desa lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu. Disisi lain, Penelitian ini ingin mengetahui apa kendala Dinas pertanian dan perikanan dalam pemberdayaan ini, mengingat selama ini upaya pemberdayaan yang dilakukan bagi petani kopi di Lumbanjulu Desa hanya sebatas mendistribusikan benih kopi Robusta. Dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Toba telah melakukan pemberdayaan di tingkat hulu. kemudian selain itu, petani menganggap selama ini belum ada peningkatan yang signifikan dari pemberdayaan ini, bahkan selama Pandemi Covid-19 pendapatan mereka mengalami penurunan, kesimpulanya peran Dinas Pertanian dan perikanan Kabupaten Toba untuk memberdayakan hulu melalui penyediaan benih dan pupuk. Hambatan dalam pemberdayaan ini disebabkan antara lain: Belum adanya program insensifikasi bagi petani kopi, ada tidak ada

penyesuaian program dengan kebutuhan petani kopi dan ada mal administrasi dalam pemberdayaan.<sup>21</sup>

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang pertama adalah:

- 1) Penelitian sebelumnya berfokus kepada Kendala Dinas Pertanian dan Perikanan dalam Pemberdayaan Masyarakat petani Kopi sedangkan penelitian ini berfokus kepada Peran dari Dinas Pertanian dalam Pemberdayaan Masyarakat petani Kopi,
- 2) Perbedaan lokasi penelitian,
- 3) Penelitian terdahulu berfokus pada saat pandemi Covid-19 sedangkan penelitian ini tidak berfokus ke masa pandemi saja,
- 4) Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya.

#### **2.2.2. Wiwing Anggrianingsih, Andi Rosdianti Razak, Anwar parawangi. “Peran Dinas Pertanian dalam program peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pertanian dalam program peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Peran Dinas Pertanian dalam program peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Nusa Tenggara Barat sudah baik, hal ini dilihat dengan adanya

---

<sup>21</sup> Arifin Sihombing, Renaldi Holomoan Silalahi, Simto FR Tampubolon, *Peranan Pemerintah Kabupaten Toba Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Di Desa Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba*, Universitas Darma Agung Medan, Vol, 6 No.2, Oktober 2021.

perkembangan yang lebih maju seperti menyediakan paket-paket teknologi, melakukan demonstrasi atau contoh penggunaan alat teknologi pertanian. Dalam hal ini zaman dulu petani masih menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul sedangkan sekarang sudah menggunakan traktor. Mendorong kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, contohnya mereka memilihkan bibit yang unggul, pupuk yang bersubsidi, juga obat-obatan sehingga hasil produksi yang diperoleh akan meningkat pesat tanpa adanya hambatan.<sup>22</sup>

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang kedua adalah:

- 1) Penelitian terdahulu berfokus kepada program peningkatan kesejahteraan petani sedangkan penelitian ini berfokus kepada peran Dinas Pertaniannya,
- 2) Perbedaan lokasi penelitian,
- 3) Sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya.

### **2.2.3. Masri Ramadhan, syarifudin “Analisis pendapatan Usaha tani kopi Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah”**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pendapatan rata-rata dan melihat tingkat kelayakan usahatani kopi di kecamatan permata di Kabupaten Bener Meriah. Dalam penelitian ini rata-rata produksi usaha tani kopi adalah sebesar 1.088 Kg/ha/Tahun dengan rata-rata harga komoditi kopi dalam penelitian ini adalah sebesar Rp 26.625,/Kg, sehingga penerimaan usaha tani kopi di Kecamatan Permata dalam penelitian ini adalah sebesar Rp 21.919.331. Per/Ha/Tahun dan

---

<sup>22</sup> Wiwing Anggrianinggsih, Andi Rosdianti razak, Anwar Parawangi, *Peran Dinas Pertanian Dalam program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat*, Vol, 2 No.3, Juni 2021.



hasil perhitungan tingkat return cost R/C di Kecamatan Permata adalah sebesar 4,11 sehingga dapat disimpulkan bahwa usahatani kopi di desa Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah layak untuk dikembangkan.<sup>23</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ketiga di atas adalah:

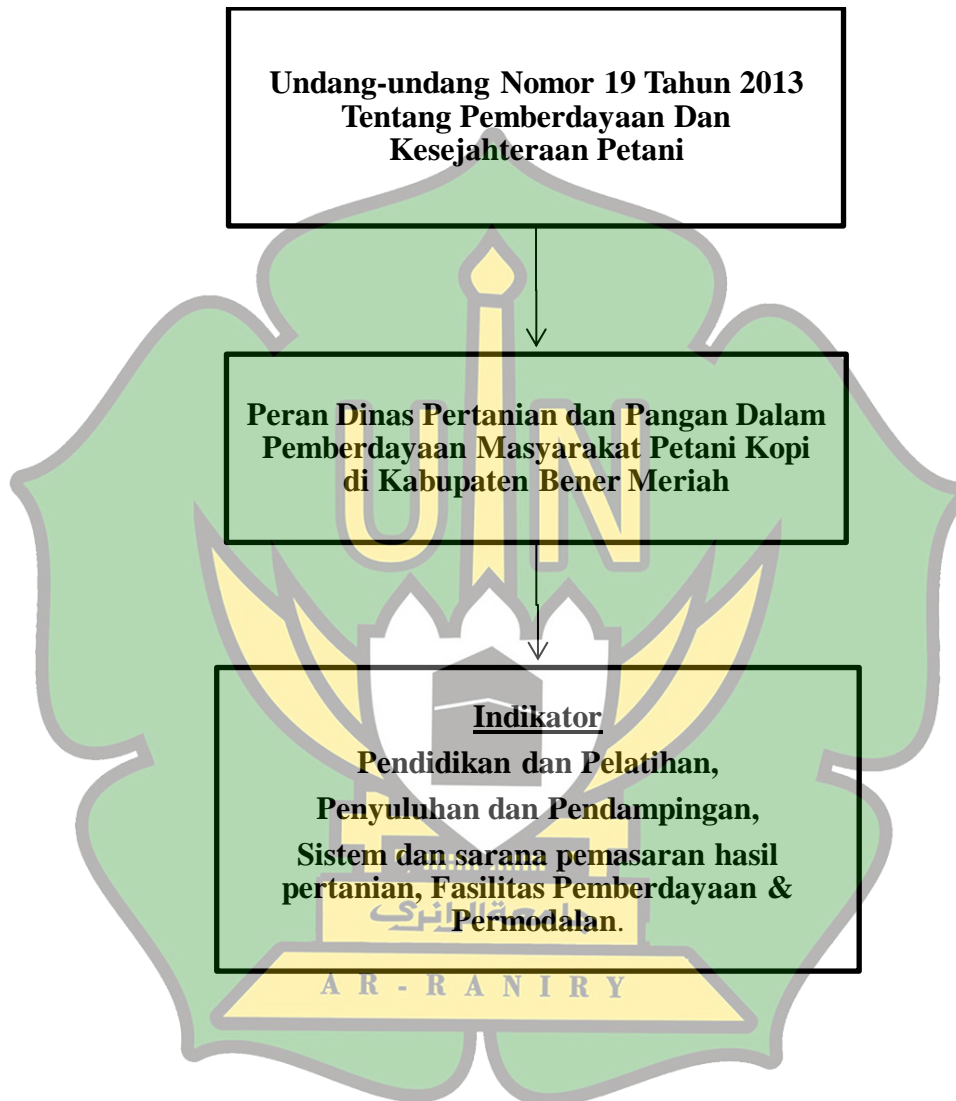
- 1) Penelitian terdahulu berfokus kepada pendapatan usaha tani, harga dan produksi kopi, sedangkan penelitian ini berfokus kepada peran Dinas Pertaniannya,
- 2) Memiliki persamaan lokasi penelitian yakni sama-sama di Kabupaten Bener Meriah, namun penelitian ini memiliki lokasi penelitian lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya,
- 3) Sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya.

---

<sup>23</sup> Masri ramadhan, Syarifuddin, *Analisis Pendapatan Usaha Tani Kopi Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah*, Vol 3, no.1, 1 Mei 2021



### 2.3. Kerangka Pemikiran



#### **2.4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Petani**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Petani adalah undang-undang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga Negara, menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk para petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Maka dari itu ditetapkan nya undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ini.

Dalam penerapannya undang-undang ini dinaungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, Dan Pasal 33 Ayat (3) Serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).

Dalam proses pemberdayaan petani pemerintah dan pemerintahan daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani guna untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi berikut merupakan hal yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah:

- 1) Pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petani dalam tatacara, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan menteri.

2) Penyuluhan dan pendampingan

Penyuluhan dan pendampingan dilakukan agar petani dapat melakukan tatacara budidaya, pasca panen, pengolahan, pemasaran yang baik, analisis kekayaan usaha serta melakukan kemitraan dengan pelaku usaha. Penyuluh paling sedikitnya satu orang dalam satu desa dan pendampingan dilakukan oleh penyuluh tersebut.

3) Sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian

Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian di selenggarakan dengan mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum. Fasilitas pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, atau kelembagaan ekonomi pertanian di daerah produksi komoditas pertanian.

4) Fasilitas pembiayaan dan permodalan

Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan dilakukan dengan pinjaman modal untuk memiliki atau memperluas kepemilikan lahan pertanian.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Petani

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (Perpektif subjek) lebih fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga dimanfaatkan sebagai gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian.<sup>25</sup>

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan garis besar penelitian sehingga observasi dan analisis data hasil penelitian lebih terarah. Fokus penelitian muncul dari analisis, kategorisasi, dan interpretasi keluaran yang muncul dalam situasi natural. Adapun focus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Edited by Sutopo. Ke 2. Bandung: ALFABETA, 2019

**Tabel 3.1**  
**Fokus Penelitian**

Dimensi	Indikator	Sumber
Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>2. Penyuluhan dan Pendampingan</li> <li>3. Sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian</li> <li>4. Fasilitas Pemberdayaan dan Permodalan</li> </ol>	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Petani

### 3.3. Lokasi penelitian

Dalam sebuah penelitian hal yang paling penting adalah lokasi penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bener Meriah. Guna mendapatkan data yang relevan terkait “Peran Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Di Kabupaten Bener Meriah”.

### 3.4. Jenis Dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara apapun. Data ini dilakukan untuk kepentingan peneliti agar pertanyaan dalam penelitian ini terjawab, pencarian data primer dapat dilakukan dengan wawancara kepada informan secara langsung, melalui telepon, ataupun dengan alat komunikasi lainnya.<sup>26</sup> Data yang diperoleh dari sumber ini merupakan hasil wawancara dan observasi langsung di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk

<sup>26</sup> Lutfiyah, Metode Penelitian kualitatif (Sistematiak Penelitian Kualitatif), Bandung, Rosda Karya, 2015.

menjawab peran yang dilakukan Dinas tersebut dalam memberdayakan masyarakat petani kopi di Kabupaten Bener Meriah.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data dari suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media perantara seperti catatan, bukti-bukti, laporan masa lalu yang telah tersimpan dalam arsip atau data documenter, peneliti memperoleh data sekunder dengan cara meminta izin dengan tujuan meminjam segala data untuk kegunaan penelitian ini.<sup>27</sup>

#### 3.5. Informan Penelitian

Moleong menjelaskan bahwa subjek penelitian atau informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual. Subjek dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan informan yang dilakukan dengan pertimbangan atau memiliki kriteria tertentu. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut: R A N I R Y

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah	1	Selaku Kepala Instansi Dinas Pertanian di Kabupaten Bener Meriah
2	Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bener Meriah	1	Selaku orang yang bertanggungjawab terhadap pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Bener Meriah

<sup>27</sup> Argita Endraswara, " Argita Endraswara," *Journal Of Chemical Information and modeling* 53, No.9, 2013



3	Masyarakat Petani Kopi Kabupaten Bener Meriah	8	Masyarakat kelompok tani kopi Kabupaten Bener Meriah
	<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono bahwa pengumpulan data diperoleh dari teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Nasution (dalam Sugiyono) mengatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Observasi adalah teknik yang pengamatannya dilakukan secara langsung terhadap subjek/objek di lapangan. Dalam hal ini observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat petani kopi di Kabupaten Bener Meriah.

#### b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bertukar pikiran informasi antara penanya dengan penjawab. Enterberg dalam Sugiyono mengatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap para informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah, Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bener Meriah, dan Masyarakat Petani Kopi Kabupaten Bener Meriah.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data pendukung kegiatan observasi dan wawancara. Sugiyono mengatakan bahwa dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya biografi, sejarah hidup, catatan harian dan sejenisnya. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, gambar hidup dan sejenisnya. Yang terakhir dokumen berbentuk karya misalnya gambar, patung, film dan sejenisnya.<sup>28</sup>

Adapun dokumentasi yang menjadi pendukung dalam penelitian ini adalah informasi berbentuk soft file yang terpublis di website atau media sosial yang bisa diakses serta relevan dengan penelitian ini maupun file yang berbentuk dokumen yang sudah dicetak misalnya seperti data-data para petani yang menerima pinjaman modal, biaya untuk mengembangkan pertanian seperti memberikan pelatihan dan penyuluhan, dan data-data seperti foto dokumentasi yang dijadikan sebagai bukti penguat dari penelitian ini.

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Edited by Sutopo. Ke 2. Bandung: ALFABETA, 2019. Hal.296-305.

### 3.7. Teknik Pengolahan Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik yang digunakan dalam analisa data sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan penyederhanaan, penggolongan dan membuang yang tidak perlu, sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan eletronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

#### b. Display Data

Display data atau penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga menimbulkan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

### c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir yakni penentuan kesimpulan. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>29</sup>

### 3.8. Teknik Keabsahan Data

Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu dilajukan uji keabsahan data uji sebagai berikut:

#### a. Credibility

Credibility merupakan teknik untuk menguji suatu kepercayaan dari data hasil penelitian yang sudah di siapkan oleh peneliti, data tersebut seperti perpanjangan pengamatan, tekun didalam penelitian, dan diskusi dengan orang sekeliling peneliti, agar penelitian tersebut tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

#### b. Dependability

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Sutopo. Ke 2. Bandung: ALFABETA, 2019. Hal.318-330.

Uji dependability merupakan suatu penelitian yang realibel, yaitu apabila orang lain mengulangi penelitian ini dengan proses yang sama maka hasilnya akan sama pula.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Sutopo. Ke 2. Bandung: ALFABETA, 2019.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bener Meriah

Dinas Pertanian Dan Pangan adalah suatu lembaga yang ditumbuhkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Lembaga ini juga melakukan pemberdayaan petani guna untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Dalam hal pengembangan pertanian Dinas ini dapat bertanggung jawab untuk mengembangkan sektor pertanian melalui program-program seperti pemberian bibit unggul, pengenalan teknologi pertanian modern, dan pendampingan petani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Dengan menyelenggarakan penyuluhan kepada petani-petani yang ada di Bener Meriah dengan teknik bertani yang baik, pemilihan varietas tanaman yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, dan praktik pertanian berkelanjutan.

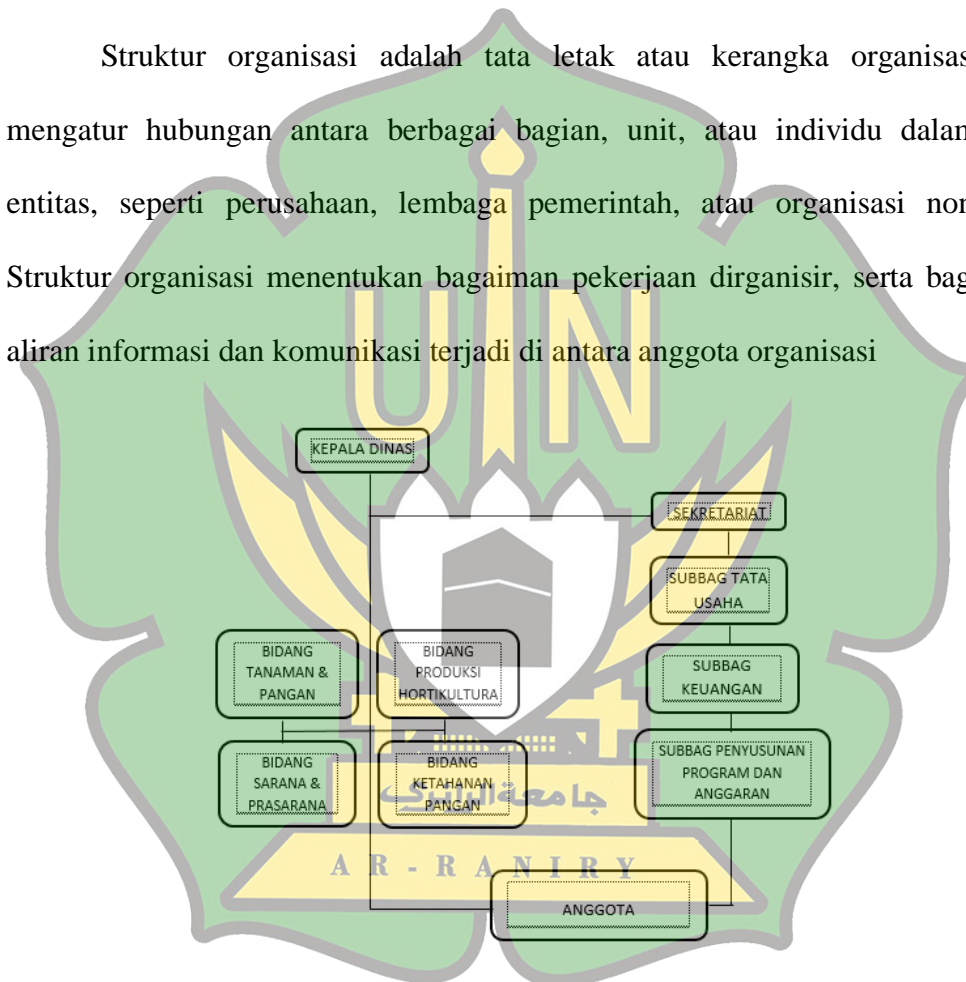
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah juga memiliki tugas untuk melakukan penguatan ekonomi petani dengan meningkatkan kesejahteraan petani melalui program-program yang mendukung pemasaran hasil pertanian,



bantuan keuangan, dan akses ke pasar. Selain itu Dinas ini juga terlibat langsung dalam pengembangan program ketahanan pangan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil di wilayah tersebut.

#### 4.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah tata letak atau kerangka organisasi yang mengatur hubungan antara berbagai bagian, unit, atau individu dalam suatu entitas, seperti perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi non-profit. Struktur organisasi menentukan bagaimana pekerjaan dirgisir, serta bagaimana aliran informasi dan komunikasi terjadi di antara anggota organisasi



**Gambar 4.1 Struktur Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah**

*Sumber: Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bener Meriah*

#### 4.1.3. Visi dan Misi

##### 1) Visi

Terwujudnya masyarakat sejahtera, sehat, produktif dan religious melalui pembangunan subsector pertanian dan pangan.

##### 2) Misi

- Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah dan petani;
- Fasilitasi perkembangan industry hulu(pembenihan/pembibitan produksi pertanian dan perikanan);
- Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- pengembangan inovasi teknologi spesifik lokasi ramah lingkungan;
- kemitraan bisnis antar usaha dalam konsep saling menguntungkan;
- Antisipasi kerawanan pangan
- Peningkatan populasi ternak, melalui inseminasi buatan dan pemasukan ternak dari luar daerah;
- Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan liar;
- Penutunan serangan organisme pengganggu tanaman.

#### 4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

**Tugas** : Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pertanian dan pangan serta tugas pembantuan.

**Fungsi** : Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian Dan Pangan menyelenggarakan fungsi:<sup>31</sup>

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan pangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian dan pangan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



---

<sup>31</sup> <https://dinpertanianpangan.benermeriahkab.go.id>

## 4.2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah informasi, data, atau temuan yang diperoleh dari suatu proses penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti atau tim peneliti. Hasil penelitian ini mencakup data dan fakta yang didapatkan dari observasi, eksperimen, analisis atau penelusuran literatur yang relevan terhadap pertanyaan penelitian atau hipotesis yang diajukan.

Dalam konteks akademik atau ilmiah, hasil penelitian ini biasanya disajikan dalam bentuk laporan atau artikel ilmiah yang disusun secara sistematis dan jelas, Tujuan dari hasil penelitian adalah untuk menyajikan informasi yang dapat dipahami dan di verifikasi oleh para pembaca atau masyarakat yang tertarik terhadap permasalahan penelitian yang disajikan, sehingga kontribusi penelitian tersebut dapat diakui dan diterapkan dalam berbagai bidang pengetahuan dan praktik terutama dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.

### 4.2.1. Pendidikan dan Pelatihan

Secara konsep pendidikan dan pelatihan adalah sebuah proses belajar mengajar dengan mempergunakan teknik dan metode tertentu guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang atau sekelompok orang.

Dalam penelitian ini pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petani dalam tatacara, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan menteri.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menemui Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bener Meriah di Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan wawancara terkait pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk para petani. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi perihal adanya Undang-Undang perlindungan petani dari instansi untuk masyarakat itu ada namun tidak secara langsung diberitahukan kepada para petani. Kami akan mengumpulkan perwakilan dari setiap kelompok tani untuk melakukan sosialisasi, kemudian dari setiap perwakilan tersebut akan mensosialisasikannya kepada para petani.”<sup>32</sup>

Kemudian selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas, dan Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bener Meriah juga menyampaikan hal yang serupa:

“Untuk sosialisasi langsung kepada masyarakat itu tidak ada. Sosialisasi dilakukan kepada perwakilan dari kelompok tani dari setiap desa. Karena kurang lebih ada 2000 kelompok tani di kabupaten bener meriah. Sosialisasi yang kami lakukan terhadap perwakilan kelompok tani akan melanjutkan sosialisasi tersebut kepada anggota kelompok tani masing-masing.”<sup>33</sup>

Lalu peneliti mewawancarai beberapa petani kopi terkait pengetahuan masyarakat terhadap adanya Undang-Undang yang melindungi petani, sebagai berikut:

“Saya tahu bahwa ada UU tentang perlindungan petani karena saya pernah terlibat didalam kelompok tani jadi saya tahu. Kami pernah diberi tahu oleh pihak instansi terkait hal tersebut saat mengikuti pelatihan bagi para tani.”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bpk. Ir. Nurisman pada 30 November 2022

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bpk. Irwansyah Putra, SP, M.Si. pada 30 November 2022

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bpk. M. Yusup pada 2 Desember 2022



Adapun untuk pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk petani, Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bener Meriah menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

“Ada. Pendidikan dan pelatihan dilakukan setiap tahun pada masyarakat tani. Untuk jadwalnya itu tidak menentu, bisa terlaksanakan sampai 2 atau 3 kali dalam setahun di Kantor Dinas Pertanian. Adapun bentuk pendidikan dan pelatihan yang diberikan yakni dengan melakukan kunjungan kesetiap desa, melihat langsung kegiatan masyarakat tani dan memberikan pengarahan terkait pembudidayaan kopi. Kita juga menyediakan beasiswa untuk petani, namun beasiswa yang dibicarakan itu hanya tersedia untuk petani yang sedang dalam masa pendidikan dan tidak berlaku untuk masyarakat tani pada umumnya. Dan jika ditanya apakah ada petani kita yang mendapatkan beasiswa itu jawabannya ada, karena beasiswa yang diberikan bukan berbentuk uang tunai, melainkan berbentuk pendidikan dan pelatihan khusus dibidang pertanian.”<sup>35</sup>



**Gambar 4.2 Pelatihan Pembuatan Pupuk Dari Kulit Kopi**  
*Sumber: Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bener Meriah tahun 2021*

Adapun wawancara peneliti dengan beberapa petani terkait Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bpk. Irwansyah Putra, SP, M.Si. pada 30 November 2022



“Ada pelatihan yang diberikan kepada kami. Dari setiap kelompok tani akan ada diundang sebagai perwakilan untuk mengikuti pelatihan terkait bagaimana menjadi petani yang baik. Pelatihannya berbentuk seminar pemberian edukasi tentang bagaimana bercocok tanam yang baik agar terhindar dari gagal panen. Contohnya seperti cara memilih biji kopi yang unggul untuk dijadikan bibit, cara merawat dan membersihkan kopi yang benar dan pemberian pupuk dengan takaran yang benar.”<sup>36</sup>

Kesimpulan dari poin pertama diatas dapat disimpulkan beberapa point sebagai berikut:

1. Masyarakat kelompok tani memang mengetahui adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Petani;
2. Masyarakat juga mengetahui adanya pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan; dan
3. Pelatihan dilaksanakan 2-3 kali dalam setahun, tetapi kegiatan tersebut tidak terjadwal dengan baik.

Pada point pertama dan kedua menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat kelompok tani terhadap Undang-Undang dan pelatihan sudah baik. Namun, pada poin ketiga menyatakan bahwa pelatihan tidak dijadwalkan secara teratur sehingga dapat mengakibatkan ketidateraturan dan kurangnya konsistensi dalam penyediaan pelatihan. Sebagai hasilnya, perlu adanya perbaikan dalam perencanaan dan pengaturan pelatihan agar dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat petani.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bpk. M. Yusup pada 2 Desember 2022

#### 4.2.2. Penyuluhan dan Pendampingan

Penyuluhan pertanian merupakan salah satu proses pemberdayaan petani. Penyuluhannya dilakukan dengan pendampingan partisipatif. Melalui penyuluhan pertanian ini, petani tidak dibiarkan sendirian dalam mengakses informasi. Adapun pendampingan dilakukan untuk membantu petani dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lingkungan petani.

Penyuluhan dan pendampingan dilakukan agar petani dapat melakukan tatacara budidaya, pasca panen, pengolahan, pemasaran yang baik, analisis kekayaan usaha serta melakukan kemitraan dengan pelaku usaha. Penyuluh paling sedikitnya satu orang dalam satu desa dan pendampingan dilakukan oleh penyuluh tersebut.

Berikut wawancara dengan Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bener Meriah, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Kita juga ada melakukan penyuluhan untuk petani, penyuluhan itu dilakukan oleh setiap perwakilan yang dipilih dari setiap kelompok tani. Jika mengikuti peraturan perundang-undangannya, jumlah penyuluh dari setiap desa berjumlah 1 orang saja, namun kita menetapkan 3 orang dari setiap desa agar lebih efektif. Penyuluhan tersebut dilaksanakan di balai desa yang atau di kantor geucik, tergantung didesa mana nanti yang dipilih untuk tempat pelaksanaannya. Untuk penyuluhan juga tidak memiliki jadwal yang rutin dan tidak terstruktur. Kalau dilihat kembali dari 2 sampai 3 tahun kebelakang, penyuluhan dilakukan sebanyak sekali dalam setahun. Ketika memang keluar jadwalnya baru dilaksanakan penyuluhan tersebut. Penyuluhan yang diberikan yakni pemberian motivasi dan edukasi tentang bagaimana tatacara budidaya tanaman yang baik dan aman, pasca panen, pengolahan, pemasaran yang baik, serta melakukan kerjasama dengan pelaku usaha.”<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bpk. Irwansyah Putra, SP, M.Si. pada 30 November 2022



**Gambar 4.3 Penyuluhan Untuk Petani Kopi**

*Sumber: Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bener Meriah tahun 2021*

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada masyarakat tani terkait kebenaran yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bener Meriah, sebagai berikut yang dijawab oleh masyarakat:

“Iya ada penyuluhan yang diberikan kepada kami para petani. Namun tidak semua ikut penyuluhan, dari setiap kelompok tani nantinya akan di undang 3 orang sebagai perwakilan untuk mengikuti penyuluhan. Dari 3 orang tersebut ketua tani wajib terlibat karena nanti penyuluhan tersebut akan dilanjutkan untuk masyarakat tani lainnya yang ada di desa. Namun penyuluhan yang disampaikan oleh kepala dinas sering kali tidak tersampaikan kepada masyarakat selain karena kesibukan yang dimiliki masyarakat, sikap tidak peduli dari sebagian masyarakat terhadap penyuluhan juga menjadi pemicu malasnya kelompok tani untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tani. Karena kebanyakan masyarakat hanya ingin bukti nyata dalam bentuk benda bukan kata-kata semata”<sup>38</sup>

Kesimpulan dari poin kedua diatas menyampaikan bahwa dari pihak kedinasan sudah memberikan penyuluhan untuk petani. Penyuluhan diberikan kepada setiap perwakilan dari setiap kelompok tani yang ada kabupaten Bener

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bpk. M. Yusuf pada 2 Desember 2022

Meriah yang kemudian akan dilanjutkan untuk masyarakat tani lainnya. Dari pihak tani juga membenarkan bahwa penyuluhan tersebut memang ada dilaksanakan dan memang tidak semua diikuti sertakan untuk menghadiri penyuluhan, hanya perwakilan yang diundang saja yang akan mengikuti penyuluhan tersebut.

Kemudian berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bener Meriah, mengenai tindak lanjut yang dilakukan pihak instansi ketika petani mengalami gagal panen:

“Ketika petani mengalami gagal panen, kami memberikan bantuan tidak secara langsung berbentuk tunai, melainkan kami melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Ketika masa panen dan petani mengalami gagal panen pihak Dinas mengadakan kerjasama dengan toke-toke kopi untuk melakukan inflasi harga agar petani terbantu. Selain itu kami juga membantu petani menangani kerugian dengan memberikan bantuan seperti bibit-bibit tanaman serta pupuk pertumbuhannya.”



**Gambar 4.4 Kolaborasi Antara Pertamina dengan Dinas Pertanian Dalam Membantu Pemberdayaan Petani**

*Sumber: Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bener Meriah tahun 2022*

“kalau pendampingan langsung oleh pihak Dinas Pertanian terhadap petani ketika pemberian bibit dan pupuk secara perseorangan itu tidak ada. Bantuan bibit dan pupuk dibagikan oleh perwakilan dari dinas kepada setiap ketua kelompok tani, kemudian setiap ketua kelompok tersebut membagikannya kepada para petani secara menyeluruh. Untuk masalah penyalahgunaannya bantuan pupuk dan bibit yang dibagikan kita tidak tahu pasti, kalau kita tanggapinya penyalahgunaan bisa saja terjadi akibat



keinginan dan kebutuhan tani tidak sama dengan yang diterima. Misalkan petani membutuhkan peralatan seperti alat pemotong rumput atau semprot hama namun yang diterima bibit dan pupuk untuk tumbuhan. Untuk itu semua kembali kepada kesadaran diri masing-masing, jika hal itu terjadi kita tidak bisa menyalahkan dinas dan tidak pula bisa menyalahkan para petaninya, dan lagi disini kita tidak melihat kebutuhan dari satu kelompok saja, melainkan bantuan yang disediakan itu memang diurutkan satu persatu dengan harapan semua akan terbagi secara merata"<sup>39</sup>

Adapun tanggapan dari petani sebagai berikut

“kalau bantuan langsung dari pemerintah yang berbentuk tunai itu tidak ada, tapi bantuan tersebut ada dalam bentuk bibit dan pupuk yang dibagikan kepada masyarakat. Kemudian untuk masalah pemeliharaan alat-alat yang diberikan memang ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab ketika sudah diberikan fasilitas tersebut, karena sudah diberikan kepada mereka jadi mereka memeliharanya dengan suka hati ”

Dari penjelasan diatas disampaikan bahwa ketika petani mengalami gagal panen ada tindakan yang dilakukan oleh pihak dinas guna membantu para petani, seperti bekerjasama dengan toke-toke kopi dan pemberian bibit, pupuk serta peralatan yang bisa membantu mengurangi kerugian akibat gagal panen yang dialami oleh petani. dari penyampaian tersebut ada hal-hal yang melanggar yang bisa saja terjadi yang dilakukan oleh petani. Seperti penyalahgunaan bantuan yang diberikan, misalkan petani membutuhkan peralatan seperti alat pemotong rumput atau semprot hama namun yang diterima bibit dan pupuk untuk tumbuhan, kemudian petani menjual bibit atau pupuk yang diberikan tersebut kepada orang ketiga. Untuk penyalahgunaan ini pihak dinas mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa karena ketika membeikan bantuan tersebut mereka tidak melihat kebutuhan dari satu kelompok saja, melainkan bantuan yang disediakan itu memang diurutkan satu persatu dengan harapan semua akan terbagi secara merata nantinya.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bpk. Irwansyah Putra, SP, M.Si. pada 30 November 2022

### 4.2.3. Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Sarana pemasaran tersebut merupakan aktivitas, proses dan/atau teknik yang digunakan untuk melakukan strategi-strategi pemasaran.

Adapun tujuan dilaksanakannya pemasaran yakni: 1) Paham pasar, yakni dilakukan untuk memahami kebutuhan, keinginan dan selera dari pasar serta untuk mengetahui daya beli konsumen terhadap produk. 2) Menciptakan produk sesuai kebutuhan. 3) Membangun citra produk, yakni suatu proses yang dilakukan untuk membangun citra produk yang baik melalui promosi baik dengan pengiklanan, promosi secara langsung maupun tidak langsung. 4) Mencapai citra yang dibangun. Citra dari suatu produk dibangun untuk menunjukkan kekhasan dari produk tersebut. 5) Penjualan yakni tujuan utama dari suatu pemasaran yang dilakukan. 6) Kepuasan konsumen.<sup>40</sup>

Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dalam penelitian ini di selenggarakan dengan mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum. Fasilitas pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, atau kelembagaan ekonomi pertanian di daerah produksi komoditas pertanian.

Berikut ini wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bener Meriah:

“untuk pemberian fasilitas dalam membantu para petani sudah tentu ada. Adapun bentuk sarana dan prasarana itu yakni seperti itu tadi berupa bibit-

<sup>40</sup> 6 Tujuan Pemasaran Yang Dilakukan. Diakses Tanggal 14 April 2023 pada <https://komputerisasi-akuntansi-d3.stekom.ac.id>



bibit tumbuhan, pupuk pertumbuhan, mesin roasting, sarana produksi dan pembentukan bangunan UPH (unit pengolahan hasil). Tujuannya agar membangun dan menumbuh kembangkan agroindustri berbasis kelompok di setiap desa dan untuk meningkatkan kualitas hasil olahan perkebunan khususnya kopi bagi petani, agar dapat meningkatkan nilai tambah dan pemasaran secara optimal melalui bantuan alat mesin pengolahan. Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah diberikan oleh Dinas Pertanian itu seperti tadi, balik lagi kepada kesadaran setiap masyarakat karena tidak mungkin kita pantau setiap harinya seperti apa masyarakat menjaga kelengkapan yang sudah diberikan, dan lagi kelengkapan peralatan tersebut juga sudah menjadi milik para petani tersebut.”



Pupuk

Bibit Kopi

Pompa listrik

#### **Gambar 4.5 Bantuan Peralatan Untuk Petani**

*Sumber: Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bener Meriah tahun 2022*

“dan untuk membantu menstabilkan para petani lokal agar bisa bersaing dengan pasar modern ada beberapa usaha yang dilakukan, salah satunya seperti memberikan edukasi tentang cara memilih bibit-bibit unggul agar perkembangan tumbuhan baik, diberi edukasi tentang cara memproduksi kopi dengan baik, dibantu dengan pemberian pupuk yang berkualitas, membangun tempat-tempat wisata kebun kopi dengan menjual produk kopi lokal, serta membatasi kerjasama dengan pasar moders agar lebih fokus dalam mengembangkan usaha-usaha tani lokal seperti wisata kebun kopi gayo. Itu semua disampaikan melalui pendidikan, pelatihan serta penyuluhan yang diselenggarakan.”<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bpk. Irwansyah Putra, SP, M.Si. pada 30 November 2022



**Gambar 4.6 Wisata Kebun Kopi Bener Meriah**  
*Sumber: Wisata Kebun Kopi Kabupaten Bener Meriah*

Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat tani yang peneliti lakukan:

“ada bantuan alat-alat seperti itu. Kalau bibit dan pupuk itu bantuan umum yang semua petani pasti menerimanya. Kalau alat-alat seperti pompa listrik, mesin penebas rumput kemudian gergaji kopi ada juga motor gerobak yang digunakan untuk mengangkut hasil panen. Tapi untuk alat-alat itu tidak semua bisa dibagi rata. Ada alat yang pemakaiannya bergantian seperti motor gerobak dan mesin penebas dan tidak semua desa juga memilikinya”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara poin nomor tiga diatas dapat disimpulkan bahwa memang benar bantuan-bantuan tersebut ada dan tersampaikan kepada masyarakat petani kopi. Namun ada bantuan peralatan-peralatan seperti motor gerobak dan mesin penebas rumput tidak semua bisa terbagi secara merata untuk setiap desa karena jumlahnya terbatas. Ada alat-alat yang diberikan perdesa itu beda-beda, ada yang pemakaiannya bergantian setiap akan digunakan dan ada yang bisa dibagikan secara merata kepada masyarakat. Dan karenanya, pihak Dinas terus

<sup>42</sup> Wawancara dengan masyarakat petani kopi pada 2 desember 2022

berupaya untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan tani agar kehidupan petani dimudahkan dan bisa hidup sejahtera.

#### 4.2.4. Fasilitas Pemberdayaan dan Permodalan

Pemberdayaan dan permodalan atau yang lebih dikenal dengan pemberian modal usaha merupakan sejumlah uang yang dipakai untuk menjalankan bisnis atau pemasaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam penelitian ini Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan dilakukan dengan pinjaman modal untuk memiliki atau memperluas kepemilikan lahan pertanian. Adapun wawancara mengenai fasilitas pembiayaan dan permodalan dengan Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bener Meriah, sebagai berikut:

“Kita menyediakan pinjaman modalnya. Modal tersebut dinamakan dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Jadi KUR tersebut berbentuk koperasi pinjaman yang hanya boleh dipinjam oleh petani, adapun persyaratan bagi peminjam modal yakni peminjam tidak bersangkutan dengan bank, harus ada surat KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), KTP, KK dan Surat izin usaha. Dinas Pertanian ikut serta dalam bagian perdagangan pemasaran produk dari hasil pertanian, kemudian untuk penetapan harga dinas pertanian tidak ikut andil kecuali ketika petani mengalami gagal panen barulah dinas membantu dengan mengendalikan harga pemasaran. Dan untuk asuransi bagi para petani belum ada karena kitapun masi dalam tahap pengembangan jadi asuransi tersebut masih berbentuk pinjaman modal dari KUR yang kita bentuk tadi.”<sup>43</sup>

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan masyarakat terkait fasilitas pembiayaan dan permodalan:

“ada, pinjamannya namaya KUR jadi disitu kita pinjam uang untuk modal bertani dan maksimal pinjaman setiap orangnya berjumlah 3 juta dalam

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bpk. Irwansyah Putra, SP, M.Si. pada 30 November 2022

kurun waktu 6 bulan pelunasan. Syarat pinjamannya kita harus ada KTP, KK, KKB dan surat ijin usaha”<sup>44</sup>

Kesimpulan dari poin nomor empat diatas bahwa tersedia pinjaman modal untuk petani. Modal tersebut dinamakan dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat). KUR tersebut merupakan sebuah koperasi pinjaman yang disediakan masyarakat tani dan hanya petani saja yang boleh melakukan pinjaman. Untuk pinjaman tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut yaitu : tidak bersangkutan dengan bank, harus ada surat KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), KTP, KK, dan surat izin usaha.

Adapun jawaban dari pihak kedinasan terkait kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan petani kopi disampaikan sebagai berikut:

“kendala yang kita hadapi mungkin ada beberapa seperti kualitas petani kita yang masih rendah, anggaran yang kita punya juga masih terbilang terbatas sehingga pelatihan dan penyuluhan yang kita berikan kepada masyarakat masih terbatas juga. Kita bilang terbatas karena bukan hanya petani kopi yang membutuhkan bantuan modal dan kelengkapan sarana dan prasarana tersebut. Masih ada kelompok tani lain selain petani kopi. Kemudian sarana dan prasarana yang kita punya atau yang kita berikan kepada petani kopi ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan ada yang sesuai. Namun terkadang kurangnya perawatan yang diberikan petani sehingga membuat peralatan tersebut tidak bertahan lama, serta yang terakhir mungkin proses pemasaran hasil produksi kopi yang rendah salah satunya dipengaruhi oleh pasar modern yang terus berkembang pada saat ini.”<sup>45</sup>

Dari penyampaian diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang di hadapi oleh pihak kedinasan ada beberapa seperti kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, permasalahan terhadap anggaran serta perawatan terhadap fasilitas

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan masyarakat petani kopi pada 2 desember 2022

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bpk. Ir. Nurisman pada 30 November 2022



yang diberikan terbilang minim akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Peran Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Bener Meriah.**

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode wawancara yang peneliti lakukan dengan semua narasumber diatas, diketahui bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah memiliki peran yang penting dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal Dinas Pertanian dan Pangan memberikan pendidikan dan pelatihan yang diadakan setiap tahun untuk masyarakat. Dalam pendidikan dan pelatihan tersebut Dinas memberikan edukasi seputar bagaimana cara bertani yang baik agar hasil panen maksimal, mengajarkan bagaimana cara menghadapi ketika terjadinya gagal panen. untuk pelatihan dilaksanakan 2-3 kali dalam setahun namun kegiatan tersebut tidak terjadwal. Ketika petani mengalami gagal panen, Dinas melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti mengadakan kerjasama dengan toke-toke kopi untuk melakukan inflasi harga agar petani terbantu. Tidak sampai disitu saja, selain memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara membudidayakan kopi dengan baik dan berkualitas, dinas juga memberikan edukasi dan motivasi bagaimana cara petani lokal bersaing dengan pasar modern. Adapun secara eksternalnya, Dinas memberikan dukungan dengan cara memfasilitasi alat yang dibutuhkan petani seperti pupuk, bibit, mesin roasting serta bangunan UPH. Adapun tujuan Dinas memenuhi sarana dan prasarana petani

yakni untuk membangun dan menumbuh kembangkan agroindustry berbasis kelompok di setiap desa dan untuk meningkatkan kualitas hasil olahan perkebunan khususnya kopi bagi petani, agar dapat meningkatkan nilai tambah dan pemasaran secara optimal melalui bantuan alat mesin pengolahan.

Diluar dari pendidikan dan pelatihan yang diberikan, dinas juga melakukan penyuluhan untuk kelompok tani. Dalam setiap kelompok ditetapkan 3 orang perwakilan. Penyuluhan tersebut dilaksanakan di balai desa atau di kantor geucik, tergantung didesa mana nanti yang dipilih untuk tempat pelaksanaannya. Untuk penyuluhan juga tidak memiliki jadwal yang rutin dan tidak terstruktur. sebagaimana jika melihat kembali dari 2 sampai 3 tahun kebelakang, penyuluhan dilakukan sebanyak sekali dalam setahun. Penyuluhan ini bertujuan untuk pemberian motivasi dan edukasi tentang melakukan tatacara budidaya tanaman, pasca panen, pengolahan, pemasaran yang baik, analisis kekayaan usaha serta melakukan kerjasama dengan pelaku usaha.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Petani Pasal 42 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani salah satunya berbentuk pemberian beasiswa. Namun, hal tersebut sampai saat ini belum terlaksanakan. Karena dari hasil wawancara yang dilakukan, pihak Dinas menyebutkan bahwa ada yang menerima beasiswa namun dari keterangan masyarakat hal tersebut sampai saat ini belum ada yang menerimanya.



Dan yang terakhir Dinas menyediakan pinjaman modal untuk para petani kopi, yang mana pinjaman tersebut disebut dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat), dimana pinjaman ini hanya berlaku untuk para petani. Adapun persyaratan untuk melakukan peminjaman modal usaha tersebut yakni yakni peminjam tidak bersangkutan dengan bank, harus ada surat KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), KTP, KK dan Surat izin usaha.

#### **4.3.2. Kendala Dan Tantangan Bagi Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Pemberdayaan Petani Kopi di Kabupaten Bener Meriah.**

Adapun faktor yang menjadi kendala dan tantangan bagi Dinas Pertanian dan Pangan dalam pemberdayaan petani kopi di kabupaten bener meriah ada beberapa, yakni:

##### **1) Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang paling utama dalam pencapaian suatu program seperti pemberdayaan masyarakat petani kopi. Saat ini kualitas Sumber daya Manusia di kabupaten bener meriah masih kurang berkualitas karena dilatar belakangi dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Ada juga SDM petani yang sama sekali tidak ada menempuh pendidikan sehingga yang diketahui oleh mereka hanya bertani dan menghasilkan hasil pertanian tanpa menghiraukan kualitas hasil panen yang dihasilkan, serta kurang antusiasnya petani dalam mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diberikan.

Untuk mengatasi permasalahan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program pemberdayaan masyarakat petani kopi di Kabupaten Bener

Meriah, peneliti mengajukan beberapa solusi yang sekiranya dapat diimplementasikan sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan; diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM Petani. Program tersebut harus mencakup peningkatan keterampilan bertani, manajemen pertanian yang baik, dan teknik-teknik modern dalam budidaya kopi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan, petani akan mampu menghasilkan produk pertanian yang lebih berkualitas dan berdaya saing.
- b. Pengenalan Inovasi Teknologi; introduksi teknologi pertanian modern, seperti penggunaan pupuk organik, irigasi yang efisien, dan metode pertanian berbasis teknologi, dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dapat berperan aktif dalam memfasilitasi dan mendukung penerapan teknologi ini di kalangan petani kopi.
- c. Penyuluhan dan Sosialisasi; perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan antusiasme petani dalam mengikuti program penyuluhan yang diberikan. Penyuluhan harus disampaikan dengan cara yang menarik dan relevan dengan kebutuhan petani. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya kualitas hasil panen yang baik dan dampaknya terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani dapat membantu

meningkatkan motivasi dan komitmen petani terhadap hasil yang lebih baik.

- d. Sistem Penguatan Jaringan; membangun jaringan dan kerjasama antar petani serta dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti lembaga pendudukan, penelitian, dan industri kopi, dapat memberikan akses ke sumber daya dan informasi yang lebih luas. Hal ini akan membantu meningkatkan kapasitas petani dan mendukung pengembangan kopi yang memiliki daya saing di pasar.

Melalui saran tersebut yang melibatkan berbagai pihak dan mendukung partisipasi aktif petani, diharapkan masalah kualitas Sumber Daya Manusia dalam program pemberdayaan masyarakat petani kopi di Kabupaten Bener Meriah dapat diatasi secara efektif.

## 2) Rendahnya Anggaran Daerah

Alokasi anggaran yang terkadang kurang mencukupi dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat petani kopi. Anggaran juga merupakan faktor penting dalam menentukan pencapaian tujuan usaha sehingga ketika anggaran dirasa kurang cukup maka tidak semua petani dapat diberikan atau dapat menerima bantuan modal bertani. Untuk anggaran pemberdayaan petani, dinas pertanian mendapatkan bantuan dari APBN, APBA, maupun APBD. Anggaran tersebut yang digunakan setiap tahunnya untuk menunjang petani dalam bertani kopi. Setiap tahunnya dinas pertanian itu mengeluarkan dana berkisar Rp.150.000.000/Kecamatan. Anggaran tersebut dapat terbilang cukup jika kegiatan dilakukan 2-3 hari dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang, kemudian

dikatakan minim jika kegiatan lebih dari 5 hari dan jumlah peserta lebih dari 25 orang ( 2 kelompok). Karena anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa dipastikan jumlahnya dan anggaran tersebut setiap tahunnya tidak tetap jumlahnya. Pelatihan itu erat kaitannya dengan waktu, peserta, narasumber, sewa tempat, kesiapan bahan dan alat serta snack dan konsumsi. Jadi parameter cukup dalam anggaran tidak bisa diperjelas, karena yang dikatakan pelatihan, penyuluhan, dan kebutuhan tani yang cukup itu susah diukur kecukupannya.

Dalam mengatasi permasalahan alokasi anggaran yang terkadang kurang mencukupi dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat petani kopi di Bener Meriah, peneliti mengusulkan solusi sebagai berikut:

- a. Diversifikasi Sumber Anggaran; Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dapat mencari dan menggali sumber anggaran tambahan selain dari APBN atau APBA. Misalnya, mencari dana dari lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan, atau mitra lain yang peduli terhadap pengembangan pertanian. Dengan diversifikasi sumber anggaran, diharapkan dapat meningkatkan total anggaran yang tersedia untuk pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Bener Meriah.
- b. Pengelolaan Anggaran yang Efisien; Penting bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah untuk mengelola anggaran dengan efisien dan transparan. Menerapkan sistem akuntabilitas yang baik akan membantu mengidentifikasi penggunaan anggaran yang tepat dan mengurangi risiko pemborosan.

- c. Evaluasi dan Peningkatan Efektivitas Program; Dinas Pertanian dan Pangan harus secara berkala mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi program yang berhasil dan memerlukan peningkatan serta memberikan panduan untuk alokasi anggaran yang lebih efektif di masa mendatang.

Melalui upaya-upaya diatas, diharapkan alokasi anggaran untuk pemberdayaan petani kopi dapat ditingkatkan dan lebih efektif dalam mendukung kemajuan pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bener Meriah.

### 3) Minimnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terbatas juga bisa menjadi penghambat berjalannya usaha petani. Bantuan pemenuhan perlengkapan oleh Dinas kepada masyarakat terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian peralatan yang diberikan kurang dirawat sehingga peralatan tidak bertahan lama. Adapun contoh minimnya sarana yang diberikan seperti semprot hama elektrik yang jumlahnya masih kurang untuk dibagi rata pada petani. Untuk saat ini jumlah semprot hama elektrik tersebut perdesun hanya dibagikan 11 buah sedangkan yang dibutuhkan untuk memadai aktivitas petani sebanyak 25 buah.

Adapun solusi yang peneliti tawarkan dari permasalahan sarana dan prasaran yang terbatas dalam usaha petani adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi Kebutuhan Secara Tepat; Dinas Pertanian dan Pangan perlu melakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasaran yang sesuai dengan kondisi dan aktivitas petani di setiap



wilayah. Dengan begitu, bantuan yang diberikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan membantu meningkatkan efisiensi dalam bertani.

- b. Pengadaan dan Pendistribusian yang Tepat; Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Bener Meriah harus memastikan bahwa pengadaan peralatan dilakukan dengan tepat dan memadai untuk memnuhi kebutuhan petani. Selain itu, pendistribusian peralatan harus dilakukan secara adil dan merata untuk memastikan bahwa semua petani mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses sarana yang diperlukan.
- c. Pengelolaan Bersama Peralatan: Dalam wilayah dengan sumber daya terbatas, petani dapat membentuk kelompok atau koperasi untuk mengelola bersama peralatan pertanian. Dengan cara ini, biaya peralatan dapat lebih terjangkau dan perawatan peralatan dapat dilakukan secara kolektif, sehingga peralatan dapat lebih optimal digunakan.

Diharapkan dengan mengimplementasikan solusi diatas, dapat menyelesaikan masalah terbatasnya sarana dan prasarana dalam usaha petani secara efektif, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bener Meriah.

#### 4) Kurangnya Kesadaran Petani

Masih sangat kurangnya kesadaran masyarakat petani dalam mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh dinas pertanian kabupaten bener meriah. Hal ini tentu membuat para petani tidak memiliki pengetahuan dan tidak dapat meningkatkan kualitas diri mereka untuk melakukan pengelolaan tanaman kopi sehingga tidak dapat meningkatkan hasil produksi yang lebih baik. Apabila



para petani tidak dapat meningkatkan hasil produksi dengan baik maka dapat mengakibatkan kurangnya kesejahteraan masyarakat petani kopi. Sehingga membuat para petani kopi belum dapat diberdayakan.

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat petani dalam mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah, peneliti mengajukan beberapa solusi sebagai berikut:

- a. Penyuluhan yang Menarik dan Relevan; Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah harus menyusun program penyuluhan yang menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan dan kepentingan petani kopi. Menggunakan metode penyampaian informasi yang kreatif, seperti video pendek, gambar, dan materi pendek yang mudah dipahami, dapat meningkatkan minat petani untuk mengikuti penyuluhan.
- b. Pemberian Penyuluhan Insentif; Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dapat memberikan penyuluhan insentif bagi petani yang aktif mengikuti pelatihan, seperti bantuan bibit, pupuk atau bantuan teknis lainnya. Insentif ini dapat menjadi dorongan tambahan bagi petani untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan partisipasi mereka.
- c. Evaluasi dan Pengukuran Dampak; Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah harus melakukan evaluasi dan pengukuran dampak dari pelatihan yang telah diadakan. Dengan melakukan evaluasi, akan dapat diketahui apakah pelatihan yang telah dilaksanakan

telah memberikan manfaat dan dampak positif bagi petani. Jika terbukti berhasil, hal ini dapat menjadi bukti yang kuat untuk meyakinkan petani lainnya untuk mengikuti pelatihan.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi diatas, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat petani dalam mengikuti pelatihan dan penyuluhan akan meningkat. Dengan demikian pengetahuan dan keterampilan, diharapkan petani kopi dapat meningkatkan kualitas produksi dan kesejahteraannya, serta berkontribusi pada pemberdayaan petani kopi secara keseluruhan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilangsungkan untuk mengetahui peran dinas pertanian dan pangan dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di kabupaten bener meriah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab 4, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pemberdayaan petani kopi di Bener Meriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah memiliki peran yang penting dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi baik secara internal maupun eksternal. Dinas memberikan pendidikan, penyuluhan serta edukasi seputar bagaimana cara bertani yang baik agar hasil panen maksimal, mengajarkan bagaimana cara menghadapi ketika terjadinya gagal panen. Ketika petani mengalami gagal panen, Dinas melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti mengadakan kerjasama dengan toko-toko kopi untuk melakukan inflasi harga agar petani terbantu. Kemudian memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara membudidayakan kopi dengan baik dan berkualitas, dinas juga memberikan arahan bagaimana cara petani lokal bersaing dengan pasar modern. Tidak hanya itu, Dinas juga memberikan dukungan dengan cara memfasilitasi alat yang dibutuhkan petani seperti pupuk, bibit, mesin roasting serta bangunan UPH. Semua itu bertujuan untuk membangun dan menumbuh kembangkan agroindustry berbasis kelompok di setiap

desa dan untuk meningkatkan kualitas hasil olahan perkebunan khususnya kopi bagi petani, agar dapat meningkatkan nilai tambah dan pemasaran secara optimal. Seperti pada instansi-instansi lainnya dalam pelaksanaan suatu agenda atau kegiatan pasti memiliki hambatan, begitupula yang dialami oleh Dinas Pertanian.

2. Dalam pelaksanaan pemberdayaan petani kopi ini ada hambatan-hambatan yang dihadapi, adapun kendala tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Rendahnya anggaran daerah, Minimnya sarana dan prasarana, serta Kurangnya kesadaran petani. Namun walaupun begitu Dinas Pertanian terus berusaha untuk melakukan yang terbaik demi menciptakan kesejahteraan bagi petani kopi.

## 5.2. Saran

1. Sebagaimana telah diselesaikannya penelitian ini, maka saran dan harapan yang peneliti sampaikan kepada Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Bener Meriah mengenai kesulitan dalam mengakses informasi, keterbukaan dan keterbatasan informasi terhadap masyarakat Bener Meriah oleh dinas pertanian, maka dari itu harapan peneliti semoga keterbukaan dan kelengkapan informasi tersampaikan secara terbuka baik di web resmi dinas pertanian maupun informasi langsung kepada masyarakat.
2. Adapun harapan peneliti kepada masyarakat tani Bener Meriah agar lebih peduli dan berpartisipasi terhadap penyuluhan dan pendidikan yang

diberikan oleh dinas pertanian Bener Meriah guna tercapainya masyarakat tani yang teredukasi dan sejahtera.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Lutfiyah, Metode Penelitian kualitatif (Sistematis Penelitian Kualitatif), Bandung, Rosda Karya, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Sutopo. Ke 2. Bandung: ALFABETA, 2019.

### Jurnal

Ali Munawar Djafri Khalil, Manager Nasution, Arief Safari, Riawan Amin, Aries Muftie, Model Pembiayaan Syariah Untuk Perkembangan Perkebunan Kopi Di Kabupaten Bener Meriah, Vol 7 No.1, Januari-Juni 2018.

Argita Endraswara, "Argita Endraswara" *Journal Of Chemical Information and modeling* 53, No.9, 2013

Arifin Sihombing, Renaldi Holomoan, Simto FR Tampubolon. Peranan Pemerintah Kabupaten Toba Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Desa Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba, Vol 6 No 2, Oktober 2021.

Dandi Ramadhan, *Pemberdayaan Petani Kopi Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh*, NPP.29.0017

Kasihani Hati Kasmita, Eva Evany, Achmad Nur Sutikno,. Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Dinas Pertanian Di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, Vol 6, No. 2, November 2021

Masri ramadhan, Syarifuddin, Analisis Pendapatan Usaha Tani Kopi Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Vol 3, no.1, 1 Mei 2021.

Wiwing Anggrianingsih, Andi Rosdianti Razak, Anwar Parawangi, Peran Dinas Pertanian Dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, Vol, 2 No. 3, Juni 2021.

### Regulasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

### Web

6 Tujuan Pemasaran Yang Dilakukan. Diakses Tanggal 14 April 2023 pada

<https://komputerisasi-akuntansi-d3.stekom.ac.id>

<https://dinpertanianpangan.benermeriahkab.go.id>

[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.PEND.LUAR.SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA.KAMIL/Pengertian\\_Pemberdayaan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.PEND.LUAR.SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA.KAMIL/Pengertian_Pemberdayaan.pdf)



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Prosedur Pertanyaan Wawancara

#### A. Pertanyaan Untuk Instansi

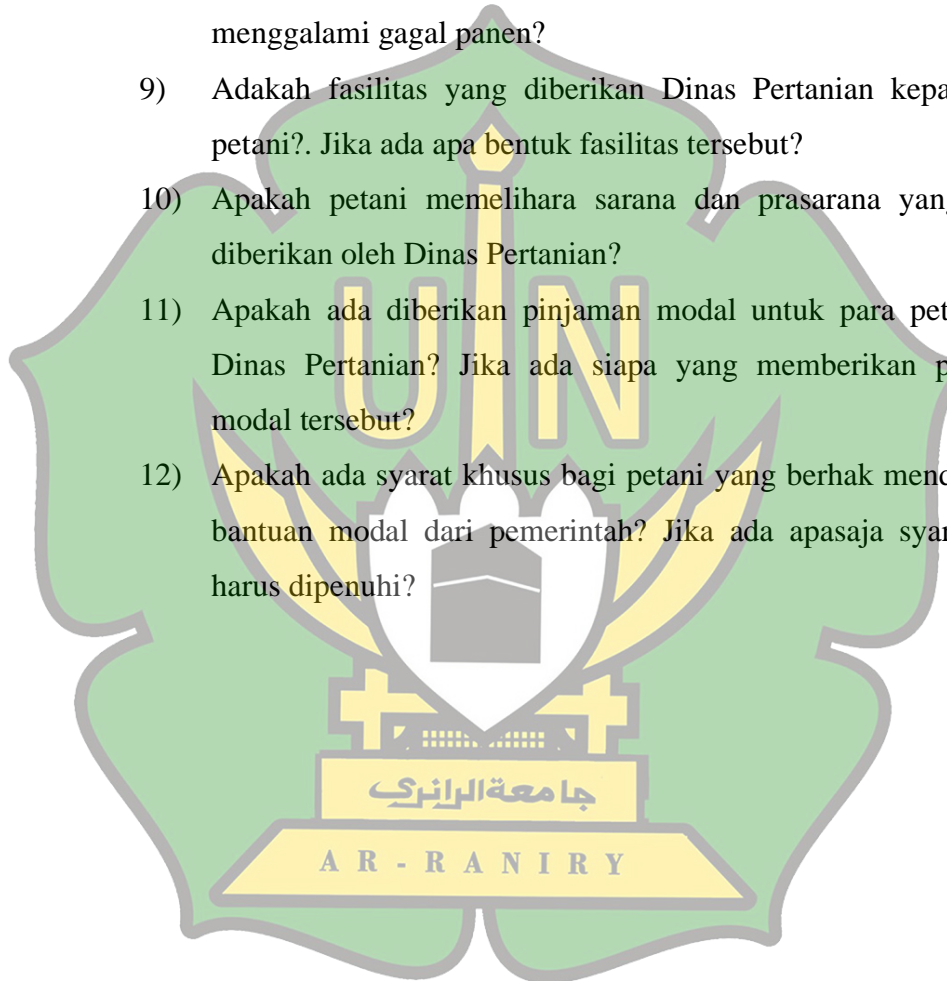
- 1) Apakah petani Bener Meriah pernah diberi tahu bahwa adanya UU yang melindungi mereka?
- 2) Apakah Dinas Pertanian pernah melakukan sosialisasi dengan para petani perihal adanya UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani?
- 3) Apakah Dinas pertanian pernah memberikan pendidikan dan pelatihan untuk petani Bener Meriah?
- 4) Jika ada bagaimana bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan Dinas Pertanian kepada para petani?
- 5) Apakah pernah ada petani kita yang mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian?
- 6) Apakah ada penyuluhan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Bener Meriah?
- 7) Berapa orang yang menjadi perwakilan dari setiap desa untuk menerima penyuluhan ini?
- 8) Apakah ada bantuan langsung dari Dinas Pertanian ketika petani mengalami gagal panen?
- 9) Apakah Dinas Pertanian melakukan kemitraan dengan pihak ketiga?
- 10) Adakah pendampingan langsung oleh Dinas Pertanian terhadap petani terkait pemberian bibit dan pupuk agar tidak di salah gunakan?
- 11) Apakah ada para petani yang menyalahgunakan bantuan bibit dan pupuk yang diberikan?
- 12) Adakah fasilitas yang diberikan Dinas Pertanian kepada para petani?. Jika ada apa bentuk fasilitas tersebut?

- 13) Bagaimana cara Dinas Pertanian menstabilkan para petani lokal agar dapat bersaing dipasar modern?
- 14) Bagaimana cara dinas Pertanian mengetahui bahwa bantuan yang diberikan tidak disalah gunakan petani?
- 15) Apakah petani memelihara sarana dan prasarana yang sudah diberikan oleh Dinas Pertanian?
- 16) Apakah ada pinjaman modal bagi para petani dari Dinas Pertanian? Jika ada siapa yang memberikan pinjaman modal tersebut?
- 17) Apakah ada syarat khusus bagi petani yang berhak mendapatkan bantuan modal dari pemerintah? Jika ada apasaja syarat yang harus dipenuhi?
- 18) Bagaimana cara Dinas Pertanian Bener Meriah dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas petani kopi?
- 19) Apakah Dinas pertanian ikut serta dalam tataniaga pemasaran, seperti menetapkan harga jual kopi di pasar?
- 20) Apakah ada asuransi yang disediakan Dinas Pertanian untuk para petani kopi Kabupaten Bener Meriah?

#### **B. Pertanyaan Untuk Masyarakat Petani Kopi**

- 1) Apakah bapak/ibu tahu bahwa adanya UU yang melindungi para petani?
- 2) Apakah Dinas Pertanian pernah melakukan sosialisasi dengan para petani perihal adanya UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani?
- 3) Apakah Dinas pertanian pernah memberikan pendidikan dan pelatihan untuk petani Bener Meriah?
- 4) Jika ada bagaimana bentuk pendidikan atau pelatihan yang di berikan Dinas Pertanian kepada para petani?
- 5) Apakah pernah ada petani kita yang mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian?

- 6) Apakah ada penyuluhan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Bener Meriah?
- 7) Berapa orang yang menjadi perwakilan dari setiap desa untuk menerima penyuluhan ini?
- 8) Apakah ada bantuan langsung dari Dinas Pertanian ketika petani mengalami gagal panen?
- 9) Adakah fasilitas yang diberikan Dinas Pertanian kepada para petani?. Jika ada apa bentuk fasilitas tersebut?
- 10) Apakah petani memelihara sarana dan prasarana yang sudah diberikan oleh Dinas Pertanian?
- 11) Apakah ada diberikan pinjaman modal untuk para petani dari Dinas Pertanian? Jika ada siapa yang memberikan pinjaman modal tersebut?
- 12) Apakah ada syarat khusus bagi petani yang berhak mendapatkan bantuan modal dari pemerintah? Jika ada apasaja syarat yang harus dipenuhi?



## Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 1117/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 06 April 2022
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :  
 PERTAMA : Menunjuk Saudara :  
 1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si Sebagai pembimbing pertama  
 2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing kedua  
 Untuk membimbing skripsi :  
 Nama : Sintia Maya Sari  
 NIM : 180802004  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dalam Pemberdayaan Petani Kopi
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 22 April 2022



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

### Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

16/11/22 15.59

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2888/Un.08/FISIP. WD.I/PP.00.9/10/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SINTIA MAYA SARI / 180802004**  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Tungkop Gampong Lam Keuneung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar  
Kode Pos 23351

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI DI KABUPATEN BENER MERIAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 November 2022

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 28 April 2023*

Eka Januar, M.Soc.Sc.



**Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian**



## Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Sintia Maya Sari  
 Tempat Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 10 September 2000  
 Nomor Handphone : 081260533277  
 Alamat : Gp. Kute Kering, Kec. Bukit, Bener Meriah  
 Email : [sintiamayasari@gmail.com](mailto:sintiamayasari@gmail.com)

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Kute Kering  
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Terpadu Bustanul Arifin Pertama  
 Sekolah Menengah Atas : MAN 1 Bener Meriah

### Sertifikasi

Ma'had Jamiah	: 87	2019	Ma'had Al-Jami'ah
TOAFL	: 403	2023	Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer	: A	2023	ICT UIN Ar-Raniry
Magang	: 95	2021	BPSDM Aceh

Banda Aceh, 2023

**Sintia Maya Sari**  
**NIM. 180802004**